

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Responden Penelitian

4.1.1.1 Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Dalam bidang perhubungan yang baik, maka dibentuk sebuah organisasi yang mampu meningkatkan sarana dan prasarana dibidang transportasi dan meningkatkan sumber potensi pendapatan dibidang perhubungan. Maka pemerintah membentuk sebuah organisasi dinas, yaitu Dinas Perhubungan di setiap Kabupaten, salah satunya di Buleleng, Bali. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng didirikan sekitar tahun 1956.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga terbentuklah di Kabupaten Buleleng Wilayah II di Singaraja yaitu Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1990. Berdasarkan Undang-Undang No 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Buleleng. Pada saat itu penyerahan sebagai urusan dibidang lalu lintas angkutan jalan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah Kabupaten se-Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah urusan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat, maka mulai saat itu terbentuklah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sampai sekarang yang meliputi bidang darat, laut dan udara.

4.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

a. Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Visi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu, terwujudnya sistem sarana dan prasarana pelayanan jasa perhubungan yang terpadu, handal dan berdaya saing.

b. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

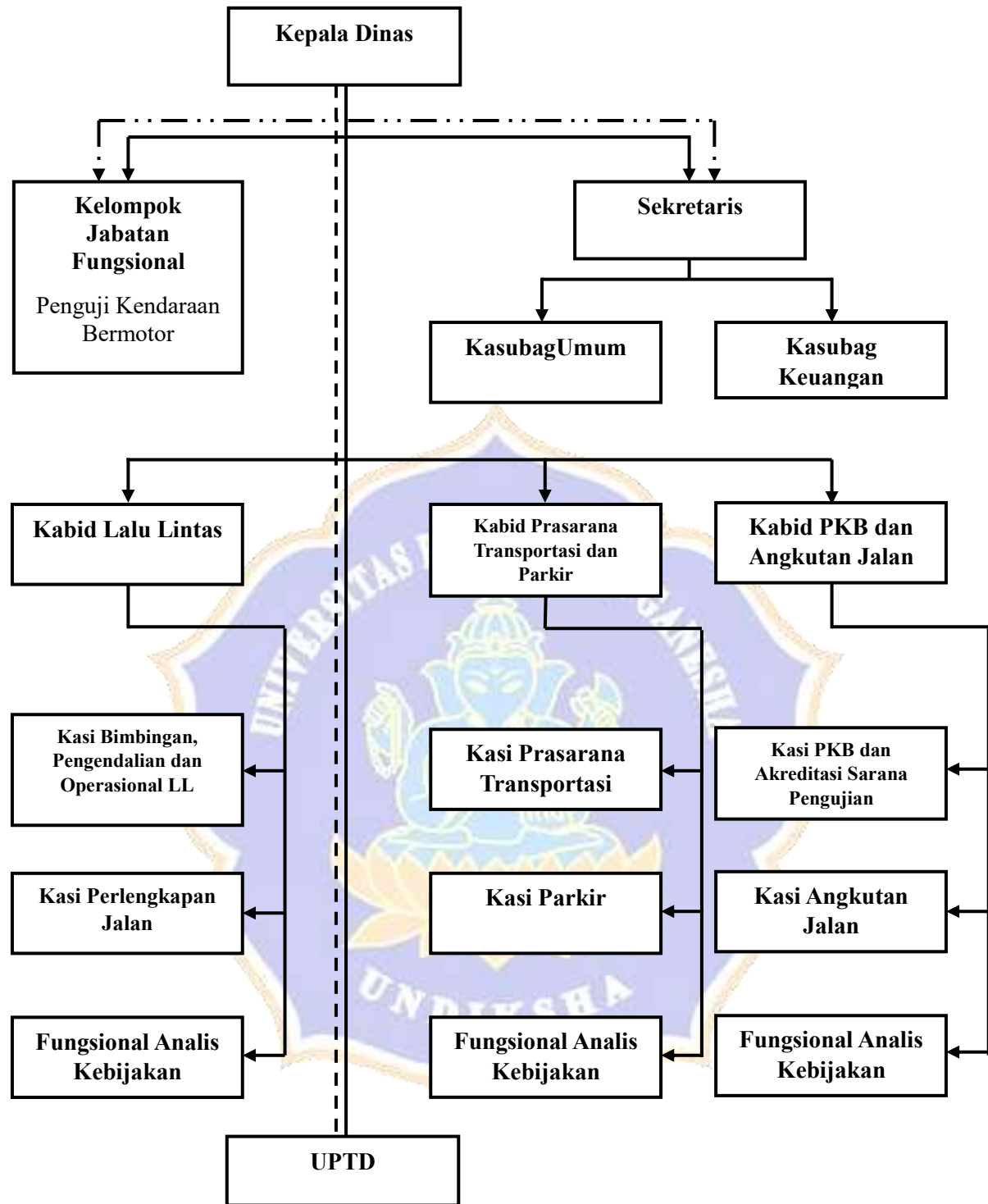
Mewujudkan sistem transportasi yang baik serta pengembangan sarana dan prasarana dan pelayanan jasa perhubungan yang handal untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Meningkatkan sumber-sumber potensi pendapatan dibidang perhubungan untuk menunjang pemantapan otonomi daerah. Mewujudkan penegakan supermasi hukum dibidang perhubungan meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme aparatur pemerintahan yang handal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

4.1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Struktur organisasi menjadi suatu sistem yang menjabarkan perihal tertentu untuk mencapai tujuan organisasi taupun mencapai sebuah proyek yang dilakukan oleh ogranisasi. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016, Tanggal 28 Desember 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Perhubungan.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perhubungan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perhubungan.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur organisasi secara umum dapat menggambarkan alur informasi terkait pergerakan suatu perusahaan seperti alur kebijakan yang ada dalam struktur terpusat akan berasal dari atas dan tersebar kebawah. Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagaiberikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, 2024

4.1.1.4 Responden Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden atau objek penelitian yaitu pegawai ASN dan non-ASN yang mengelola keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Pada penelitian ini, sampel seluruh populasi yang digunakan yaitu sampel jemu yang menggunakan seluruh penelitian yaitu ASN dan non-ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebanyak 50 responden.

Variabel-varial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, variabel terikat adalah pengelolaan keuangan (Y), sedangkan variabel bebas adalah akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2). Untuk pengumpulan data penelitian ini, sebagai tolak ukur skala *likert* digunakan untuk membuat kuesioner ini. Kuesioner penelitian ini disebarakan secara *offline* atau langsung yang ditujukan kepada seluruh ASN dan non-ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Penyebaran dan pengisian data dilakukan selama dua (2) hari mulai tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan 14 Mei 2025. Adapun data pendistribusian kuesioner yang diperoleh yakni:

Tabel 4. 1 Data Pendistribusian Kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang di distribusikan	50
Kuesioner yang diterima	50
Presntase kelengkapan pengisian kuesioner	100%

Sumber: Data Diolah, 2025

Dilihat dari tabel pendistribusian kuesioner penelitian bahwa kuesioner terdistribudi dengan sempurna yaitu menyebar kuesioner sebanyak 50 *eksemplar* dan yang diterima juga 50 *eksemplar*, sehingga presentase kelengkapan pengisian kuesioner sebesar 100%.

4.1.2 Karakteristik Responden

Karakterisrik responden ditunjukan dengan nilai frekuensi dan presentase jenis kelamin, umur, dan divisi responden. Sebanyak 50 responden di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, dengan rincian berikut:

Tabel 4. 2 Data Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Keterangan	Nilai Frekuensi		Presentase
			ASN	Non ASN	
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	14	12	52%
		Perempuan	11	13	48%
Total Responden			50		100%
2	Umur	20-29 Tahun	4	1	10%
		30-39 Tahun	2	17	38%
		40-49 Tahun	11	3	28%
		50-59 Tahun	11	1	24%
Total Responden			50		100%
3	Devisi	Sekretariat	20	20	80%
		Bidang LLAJ	2	2	8%
		Bidang Prasat	2	2	8%
		Bidang Teksar	1	1	4%
Total Responden			50		100%

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan jenis kelamin responden, seperti dalam tabel di atas, terdapat total 26 responden laki-laki, dengan presentase 52% dan total 24 responden perempuan dengan presentasi 48%. Dengan demikian laki-laki mendominasi dalam penelitian ini dibandingkan dengan perempuan.

Selanjutnya, jika umur responden dipertimbangkan pada tabel di atas 5 responden dari kelompok umur 20 tahun sampai 29 tahun memiliki presentase 10%; 19 responden dari kelompok umur 30 tahun sampai 39 tahun memiliki presentase 38%; 14 responden dari kelompok 40 tahun sampai 49 tahun memiliki presentase 28%; dan terakhir 12 responden dari kelompok 50 tahun sampai 59 tahun memiliki presentase 24%. Sehingga yang mendominasi dalam penelitian ini memiliki umur 30 tahun sampai 39 tahun.

Jika dilihat dari divisi yang dimiliki oleh responden yang bekerja di bidang sekretariat sebanyak 40 responden dengan presentase sebesar 80%, yang bekerja di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) sebanyak 4 responden dengan presentase sebesar 8%, yang bekerja di bidang Prasarana Transportasi dan Parkir (Prasat) sebanyak 4 responden dengan presentase sebesar 8%, dan terakhir yang bekerja di bidang Teknik Sarana dan Angkutan Jalan sebanyak 2 responden

dengan presentase 4%. Sehingga dapat dilihat dalam penelitian ini yang mendominasi responden berkerja di bidang sekretariat dengan jumlah 40 responden dengan presentase sebesar 80%.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang distribusi data dari variabel dependen atau terikat, yaitu pengelolaan keuangan (Y) dan variabel independent atau bebas yaitu akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2).

Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_ X1	50	12	25	18,94	3,899
Total_ X2	50	10	25	18,36	4,346
Total_ Y	50	12	25	28,98	4,043
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data Diolah, 2025

Dilihat dari tabel diatas berdasarkan analisis statistik deksriptif yang telah dilakukan dapat disimpulkan tiga deskripsi atau gamabaran hasil penelitian:

1. Data variable Akuntabilitas (X_1) yaitu memperoleh nilai terkecil (minimum) yaitu sebesar 12 dan nilai terbesar (maksimum) yaitu sebesar 25. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 18,94 dan standar deviasi nya sebesar 3,899. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara merata atau dalam artian bahwa data variable X_1 yaitu akuntabilitas tidak terlalu bervariasi. Jika dilihat dari posisi nilai mean, yaitu 18,94, maka nilai tersebut lebih mendekati nilai maksimum (25) dibandingkan dengan nilai minimum (12). Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, sebagian besar responden memberikan penilaian akuntabilitas yang berada pada nilai sedang hingga tinggi, atau

dengan kata lain pegawai menilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Perhubungan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa yang memberikan skor rendah. Interpretasi ini memperkuat bahwa persepsi terhadap akuntabilitas cenderung positif, namun perlu perhatian terhadap responden yang menilai rendah agar kesenjangan persepsi dapat diminimalkan.

2. Data variable Tranparansi (X_2) yaitu memperoleh nilai terkecil (minimum) yaitu sebesar 10 dan nilai terbesar (maksimum) yaitu sebesar 25. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 18,36 dan standar deviasi nya sebesar 4,346. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara merata atau dalam artian bahwa data variable X_2 yaitu transparansi tidak terlalu bervariasi. Jika dilihat dari posisi nilai rata-rata, yaitu 18,36, maka nilai tersebut lebih dekat ke nilai maksimum (25) dibandingkan nilai minimum (10). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian terhadap transparansi dalam kategori sedang hingga tinggi. Dengan kata lain, persepsi responden terhadap transparansi di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng cenderung positif, meskipun terdapat sebagian kecil responden yang menilai rendah. Penelitian ini mengindikasikan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan dinilai cukup baik oleh mayoritas pegawai, tetapi diperlukan peningkatan agar seluruh aspek transparansi dapat dijalankan secara menyeluruh dan merata.
3. Data variable Pengelolaan Keuangan (Y) yaitu memperoleh nilai terkecil (minimum) yaitu sebesar 12 dan nilai terbesar (maksimum) yaitu sebesar 25. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 18,98 dan standar deviasi nya sebesar 4,043. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara merata atau dalam artian bahwa data variable pengelolaan keuangan (Y) tidak terlalu bervariasi. Jika ditinjau dari posisi nilai rata-rata sebesar 18,98, maka nilai tersebut lebih dekat ke nilai maksimum (25) dari pada ke nilai minimum (12). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian terhadap pengelolaan keuangan dalam kategori sedang ke arah tinggi. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum, persepsi pegawai terhadap pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng cukup baik. Meskipun begitu, diperlukan upaya peningkatan dalam proses pengelolaan keuangan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

4.3 Pengujian Asumsi

4.3.1 Uji Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian diuji untuk memastikan kualitasnya. Uji kualitasnya. Uji kualitas data terdiri dari dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Ini menjadi tahap pertama dalam melakukan analisis data yang disebut juga sebagai analisis awal.

4.3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner adalah benar. Uji ini menunjukkan bahwa data saat melakukan pengukuran adalah akurat dan stabil. Sujarweni (2015) mengatakan hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel ($df = n-2$) dengan nilai sig 5% dapat digunakan untuk mengetahui keabsahan setiap pertanyaan.

Jika hasil r tabel $<$ hasil r hitung, maka pertanyaan tersebut dianggap valid. Nilai sig. dari setiap instrumen dalam aplikasi SPSS ver. 25 dihitung untuk menguji validitasnya. Jika nilai sig. $< 0,05$, instrumen tersebut dianggap valid.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Signifikansi (Sig.)	Keterangan
Akuntabilitas (X_1)	X1.1	0,783	0,284	0	Valid
	X1.2	0,779	0,284	0	Valid
	X1.3	0,832	0,284	0	Valid
	X1.4	0,913	0,284	0	Valid
	X1.5	0,829	0,284	0	Valid
Transparansi (X_2)	X2.1	0,867	0,284	0	Valid
	X2.2	0,877	0,284	0	Valid
	X2.3	0,89	0,284	0	Valid
	X2.4	0,84	0,284	0	Valid
	X2.5	0,823	0,284	0	Valid

Pengelolaan Keuangan (Y)	Y.1	0,855	0,284	0	Valid
	Y.2	0,858	0,284	0	Valid
	Y.3	0,87	0,284	0	Valid
	Y.4	0,871	0,284	0	Valid
	Y.5	0,889	0,284	0	Valid

Sumber: Data Diolah, 2025

Dari data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang berhubungan dengan Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), dan Pengelolaan Keuangan (Y) dapat dinyatakan valid karena setiap pertanyaan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai r hitung lebih besar dari pada nilai r tabel, dengan r tabel sebesar 0,284.

4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrument penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa konsisten alat ukur dalam penggunaan instrument penelitian jika jawaban dari suatu kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, kuesioner tersebut dianggap handal atau realible (Ghozali, 2018). *Koefisien Cronboch Alpha* dianggap dapat diandalkan jika nilainya lebih besar atau sama dengan 0,60.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Alpha	Keterangan
Akuntabilitas (X_1)	0,882	0,60	Reliabel
Transparansi (X_2)	0,912	0,60	Reliabel
Pengelolaan Keuangan (Y)	0,916	0,60	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2025

Dilihat pada tabel 4.4 diatas bahwa variabel Akuntabilitas (X_1) memiliki *Cronbach Alpha* sebesar 0,882 lebih besar dari 0,60 data tersebut dikatakan reliabel. Variabel Transparansi (X_2) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,912 lebih besar dari 0,60 data tersebut reliabel. Variabel Pengelolaan Keuangan (Y) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,916 lebih besar dari 0,60 data tersebut dapat dikatakan reliabel.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memeriksa atau menganalisis data yang diperoleh. Sebelum pengujian hipotesis, uji asumsi dilakukan untuk menentukan apakah terjadi penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi linear berganda. Ini dilakukan dengan menggunakan model regresi untuk menguji normalitas, lineasitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

4.3.2.1 Uji Normalitas

Kolmogorov Smirnov digunakan untuk menggunakan statistik nonparametrik dalam uji normalitas. Pengujian dua arah menunjukkan bahwa data terdistribusi normal jika nilai signya $> 0,05$ dan data tidak terdistribusi normal jika nilai signya $< 0,05$. Tabel berikut menunjukkan hasil uji normalitas.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,83041736
Most Extreme Differences	Absolute	0,080
	Positive	0,62
	Negative	-0,080
Test Statistic		0,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.6 dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S) Test menunjukkan nilai 0,200. Berdasarkan kriteria pengujian normalitas, suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig. lebih besar dari 0,05. Sehingga pada hasil pengujian

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebaran data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah beberapa atau semua variabel independent memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Nilai VIF < 10 dan nilai toleransi $> 0,1$ adalah nilai yang sering digunakan untuk menunjukan model regresi yang bebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized		Standardized		Collinearity		
		Coefficients		Coefficients		Statistics		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,293	1,325		1,731	0,090		
	Total_X1	0,414	0,15	0,4	2,772	0,008	0,210	4,768
	Total_X2	0,481	0,134	0,517	3,588	0,001	0,210	4,768
a. Dependent Variable: Total_Y								

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel hasil uji multikolenearitas diatas menunjukan bahwa nilai tolerance pada variabel Akuntabilitas (X_1) sebesar $0,210 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $4,768 < 10$, dapat diktakan variabel (X_1) tidak mengalami multikolinearitas. Variabel Transparansi (X_2) sebesar $0,210 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $4,768 < 10$, dapat dikatakan variabel (X_1) tidak mengalami multikolinearitas. Jadi, nilai tolerance pada semua variabel independen berada di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10 sehingga dapat disimpulkan setiap variabel terbebas dari multikolinearitas.

4.3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser dengan kriteria nilai probabilitas signifikansinya diatas 5% maka variabel tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas, sedangkan apabila dibawah 5% maka terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,357	0,851		1,595	0,117
	Akuntabilitas	0,033	0,096	0,11	0,344	0,732
	Transparansi	-0,032	0,086	-0,12	-0,377	0,708
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)						

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada table diatas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas terlihat bahwa nilai signifikansi variabel Akuntabilitas (X_1) sebesar 0,732 dan pada variabel Transparansi (X_2) sebesar 0,708 sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam upaya untuk menentukan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen, model analisis regresi linier berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independent. Berikut hasil uji analisis regresi linier berganda dalam tabeh dibawah ini:

Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2,293	1,325		1,731	0,090
	Akuntabilitas	0,414	0,150	0,400	2,772	0,008
	Transparansi	0,481	0,134	0,517	3,588	0,001
a. Dependent Variabel: Pengelolaan Keuangan						

Sumber: Data, Diolah 2025

$$Y = 2.293 + 0.414X_1 + 0.481X_2 + e$$

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien konstanta sebesar 2,293. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel akuntabilitas dan transparansi menunjukkan nilai yang konstan maka variabel pengelolaan keuangan adalah sebesar 2,293
- b. Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X_1) sebesar 0,414 berarti dapat dikatakan bahwa jika terjadi peningkatan pada variabel Akuntabilitas (X_1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan, maka besarnya nilai pengelolaan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,414.
- c. Nilai koefisien regresi variabel Transparansi (X_2) sebesar 0,481 berarti dapat dikatakan bahwa jika terjadi peningkatan pada variabel Transparansi (X_2) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan, maka besarnya nilai pengelolaan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,481.

4.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berkisar dari nol hingga satu. Kemampuan variabel independent untuk menjelaskan variasi variable dependen sangat terbatas, menurut nilai R^2 . Dalam situasi di mana koefisien determinasi sama dengan nol, variabel independent dianggap tidak berdampak pada variabel dependen. Sebaliknya, dalam situasi di mana koefisien determinasi sama dengan satu, variabel independent dianggap berdampak pada variabel dependen. Tabel berikut menunjukkan hasil tes koefisien determinasi.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,892	0,795	0,786	1,869	2,319
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas dan Transparansi					
b. Dependen Variabel: Pengelolaan Keuangan					

Sumber: Data Diolah, 2025

Pada tabel tersebut menunjukkan nilai Adj. R Square sebesar 0,786 atau 78,6%. Nilai R Square sebesar 0,795 (diperoleh dari pengkuadratan nilai R yaitu $(0,892)^2$). Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2) mampu menjelaskan variabel Pengelolaan Keuangan (Y) sebesar 78,6% sedangkan sisanya yaitu 21,4% dijelaskan oleh variabel lain.

4.4.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Semua variable independent yang digunakan dalam penelitian ini berdampak pada variable dependent secara unik. Uji independe t digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen memengaruhi variabel dependent secara khusus jika signifikansi nilai sebesar 0,05. Selain itu, seseorang dapat menggunakan metode untuk membandingkan T hitung dan T tabel; jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka semua variabel independent memberikan pengaruh yang signifikan pada variabel dependent.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Hipotesis (t)

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2,293	1,325		1,731	0,090
	Total_X1	0,414	0,150	0,400	2,772	0,008
	Total_X2	0,481	0,134	0,517	3,588	0,001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan

Sumber: Data Diolah, 2025

Uji t dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan nilai t table sebesar 2,012. Kesimpulan yang diambil dalam uji t ini adalah dengan melihat signifikansi (α) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila tingkat signifikansi $< \alpha = 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel: hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya.
- Apabila tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel: hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan secara parsial variabel independen

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya.

Berdasarkan hasil uji statistik t yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. **Pengujian hipotesis pertama (H_1)** dapat dilihat pada table diatas mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ dengan nilai t hitung diperoleh sebesar $2,772 > t$ tabel sebesar 2,012 maka dapat dinyatakan bahwa variabel Akuntabilitas (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Pengelolaan Keuangan (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas (X_1) mempunyai hubungan yang searah dengan Pengelolaan keuangan (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yaitu akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
- b. **Pengujian hipotesis kedua (H_2)** dapat dilihat pada table diatas mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dengan nilai t hitung diperoleh sebesar $3,588 > t$ tabel sebesar 2,012 maka dapat dinyatakan bahwa variabel Transparansi (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Pengelolaan Keuangan (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel Transparansi (X_2) mempunyai hubungan yang searah dengan Pengelolaan Keuangan (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yaitu transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan uji regresi linear berganda, koefisien regresi dari variabel akuntabilitas sebesar 0,414. Apabila variabel lainnya tetap dan peningkatan pada akuntabilitas akan meningkat sebesar 0,414. Pengujian Hipotesis (H_1) ini menggunakan sampel sebanyak 50 responden, didapat besar t hitung dari variabel akuntabilitas sebesar 2,772, serta nilai signifikansinya sebesar $0,008 < 0,05$ yang berarti antara kedua variabel yaitu akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ini memiliki hasil yang positif signifikan.

Pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini diduga kuat dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan keuangan di lingkungan instansi tersebut. Peningkatan akuntabilitas tercermin dari kemampuan pegawai dalam melaksanakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, pelaporan kinerja, serta upaya korektif terhadap kesalahan pencatatan yang terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Hal ini diperkuat dengan Teori Agensi (*Agency Theory*), di mana dalam hubungan antara atasan (*principal*) dan bawahan (*agent*), diperlukan sistem pertanggungjawaban yang jelas agar setiap tindakan agen dapat diarahkan untuk mencapai kepentingan organisasi. Dalam konteks ini, akuntabilitas memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. Semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki oleh pegawai, maka semakin besar pula tanggung jawab dan kesadaran mereka dalam mengelola keuangan secara transparan, tepat, dan efisien. Dengan demikian, akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan atasan terhadap agen, sekaligus mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan yang akurat dan sesuai dengan tujuan instansi. Prinsip-prinsip dalam Teori Agensi yang menekankan pentingnya pengawasan dan pertanggungjawaban untuk meminimalisir konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dapat dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas yang diterapkan oleh pegawai. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, setiap kegiatan keuangan dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika pegawai mampu menunjukkan tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan, maka pengelolaan keuangan akan berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas

pegawai, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari & Nur Fadjrih Asyik, 2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pembangun desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gerryan Putra, 2017) di Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Pengaruh tidak signifikan tersebut dikarenakan belum maksimalnya pemanfaatan suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.5.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis (H_2) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara transparansi dan pengelolaan keuangan. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan dari 50 responden, diperoleh t hitung untuk transparansi sebesar 3,588 dengan koefisien regresi sebesar 0,481 dan signifikansi $0,001 < 0,05$ yang mengartikan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng (H_2) diterima dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh tingkat transparansi yang diterapkan dalam suatu instansi. Semakin tinggi transparansi yang dilakukan, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan pada instansi tersebut. Transparansi yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan, di mana transparansi memungkinkan akses informasi yang terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Jika dibandingkan antara kedua variabel, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengelolaan keuangan dibandingkan dengan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari koefisien regresi

transparansi yang lebih tinggi (0,481) dibandingkan koefisien regresi akuntabilitas (0,414), serta nilai t-hitung transparansi (3,588) yang juga lebih tinggi daripada t-hitung akuntabilitas (2,772). Dengan demikian, transparansi merupakan variabel yang paling dominan dan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Upaya peningkatan keterbukaan informasi, aksesibilitas data keuangan, dan partisipasi dalam pelaporan anggaran perlu menjadi fokus utama untuk memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dan efisien.

Kondisi ini mencerminkan bahwa keterbukaan informasi, kemudahan akses terhadap laporan keuangan, serta penyampaian informasi program kerja yang akurat dan lengkap, turut mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, transparansi dapat menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Hal ini didukung oleh *Agency Theory*, yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi antara pihak principal dan agent sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan serta memastikan pengelolaan sumber daya berjalan efisien dan bertanggung jawab. Transparansi dalam pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan baik akan mendorong proses pelaporan, pencatatan, dan pertanggungjawaban yang terbuka serta mudah diakses oleh pihak terkait. Dalam konteks Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, transparansi dalam penyajian data anggaran, keterbukaan dokumen, dan informasi kegiatan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas publik, mencegah penyimpangan, serta berkontribusi positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dan pencapaian tujuan instansi.

Informasi yang tersedia melalui transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat mencerminkan kualitas kerja di setiap bagian divisinya serta menjadi acuan dalam menilai efektivitas proses keuangan. Jika transparansi diterapkan dengan baik, maka seluruh proses pencatatan, pelaporan, dan penggunaan anggaran dapat diakses secara terbuka dan mudah dipantau. Hal ini akan mempermudah instansi dalam meninjau pelaksanaan keuangan di masa lalu sebagai tolak ukur untuk perbaikan dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dengan

demikian, transparansi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Hasil penelitian ini juga searah dengan (Novitasari & Asyik, 2019) menunjukkan hasil bahwa dengan adanya transparansi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran juga semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitri Sukmawati & Alfi Nurfitriani, 2019), studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut menyatakan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.

4.6 Implikasi Penelitian

4.6.1 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh temuan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Hal ini membuktikan bahwa teori yang digunakan dalam penelitian ini, seperti *Agency Theory*, dapat mendukung hasil penelitian dalam menjelaskan bagaimana kedua variabel tersebut memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan. Hasil ini juga dapat menjadi referensi dalam proses pembelajaran, khususnya dalam mata kuliah yang membahas pengelolaan keuangan sektor publik, serta sebagai bahan tambahan untuk memperkaya pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik di instansi pemerintah.

4.6.2 Implikasi Praktis

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan (Y), dengan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,772 > t$ tabel $2,012$. Artinya, setiap peningkatan dalam akuntabilitas baik dari sisi pencatatan, pelaporan, maupun pelaksanaan anggaran akan secara langsung berdampak pada membaiknya kualitas pengelolaan keuangan. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah, pertama, terkait akuntabilitas (X_1), penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan faktor strategis dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Dalam praktiknya, penerapan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dan disiplin pegawai dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai prosedur, seperti dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sehingga mampu meminimalkan keterlambatan pelaporan dan kesalahan administratif. Selain itu, akuntabilitas juga menuntut adanya pembagian tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih, agar setiap pegawai memahami dengan tepat tanggung jawab masing-masing dan tidak terjadi saling lempar tanggung jawab ketika menghadapi masalah dalam pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng diharapkan dapat terus meningkatkan budaya pertanggungjawaban dalam pencatatan, pelaporan, serta tindak lanjut terhadap penggunaan anggaran, agar setiap kegiatan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan internal yang mendukung peningkatan budaya akuntabilitas di lingkungan kerja instansi.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua (H_2), diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001$, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $0,05$, serta nilai t hitung sebesar $3,588$, yang lebih besar dari t tabel sebesar $2,012$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan (Y) di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Nilai t yang positif mengindikasikan bahwa semakin

tinggi tingkat transparansi yang diterapkan, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan dalam instansi tersebut. Terkait transparansi (X_2), penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan bebas dari penyimpangan. Selain itu, penting untuk meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai dalam proses penyusunan dan pelaporan anggaran, agar setiap individu dalam organisasi memahami alur kerja dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi yang sangat penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan profesional. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan internal yang mendukung terbentuknya sistem pengelolaan keuangan yang terbuka, partisipatif, serta mampu menjawab tuntutan publik terhadap pengelolaan dana yang lebih efisien dan dapat di pertanggungjawabkan.

